

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, bangsa Belanda telah lebih dahulu menguasai wilayah Nusantara selama sekitar 350 tahun. Selama masa penjajahan tersebut, Belanda membentuk karakter masyarakat Indonesia sesuai dengan kebijakan kolonial yang sangat menindas dan eksploitatif. Sistem kolonial yang diterapkan tidak hanya bertumpu pada kekuasaan politik, melainkan juga menjangkau bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Masa penjajahan Belanda merupakan periode panjang penderitaan rakyat, ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan, kelaparan, serta kematian yang disebabkan oleh sistem-sistem yang diterapkan dengan semena-mena oleh pemerintah kolonial.

Beberapa kebijakan kolonial Belanda mencerminkan sifat kekuasaan yang menindas. Kebijakan seperti *contingenten* memaksa rakyat untuk membayar pajak hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Rakyat juga diwajibkan menjual hasil panennya kepada Belanda dengan harga yang sangat rendah melalui kebijakan *verplichte leverantie*. Selain itu, sistem *preangerstelsel* secara khusus memaksa masyarakat Priangan untuk menanam kopi demi kepentingan ekspor kolonial.¹

Penjajahan Belanda di Hindia Belanda berawal dari kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang mulanya hanya untuk berdagang melalui organisasi dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). VOC didirikan pada 20 Maret 1602 atas paksaan pemerintah Belanda yang menggabungkan enam perusahaan kecil yang saling bersaing.² Melalui piagam (*oktroi*), VOC diberi hak monopoli untuk berdagang di wilayah timur Tanjung Harapan, menjadikannya kekuatan ekonomi dan militer yang tangguh. Pada abad ke-17, VOC mencapai

¹ Duma Lumban Gaol & Reka Seprina, *Ketatanegaraan Indonesia di Bawah Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)*, KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP UNJA, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 187.

² F.S. Gaastra, *Organisasi VOC*, diterjemahkan oleh Syahrita Chairaty Kasim dan Dr. Th. van den End, dalam *Sejarah VOC*, hlm. 29.

puncak kejayaan berkat modal yang melimpah, memungkinkannya membiayai operasi militer untuk mengamankan monopoli rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan kayu manis. Keberhasilannya juga didorong oleh jaringan perdagangan intra-Asia yang sangat menguntungkan serta hak eksklusif untuk berdagang dengan Jepang, yang memberinya akses mudah ke perak.³

Namun, memasuki abad ke-18, dominasi VOC mulai terkikis. Persaingan dari East India Company (EIC) Inggris semakin ketat, sementara monopoli rempah-rempah menjadi kurang signifikan. Pendapatan dari perdagangan di Asia tidak lagi mampu menutupi biaya operasional dan administrasi yang membengkak, menyebabkan kegiatan VOC di Asia terus merugi. Akibatnya, perusahaan menjadi sangat bergantung pada hasil penjualan di Belanda, sebuah posisi yang rentan.

Kehancuran VOC dipercepat oleh pecahnya Perang Inggris Keempat (1780), yang melumpuhkan jalur pelayaran dan menyebabkan krisis keuangan parah. Perusahaan hanya mampu bertahan dengan dukungan pemerintah Belanda. Akhirnya, setelah perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf, direksi VOC dipaksa mundur pada tahun 1796 dan perusahaan dinasionalisasi. Piagam VOC tidak diperpanjang dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 1800, menandai akhir dari riwayat perserikatan dagang yang pernah menjadi yang terbesar di dunia ini.⁴

Pada awal abad ke-20, pemerintahan Belanda mulai menerapkan Politik Etis yang dipengaruhi oleh kritik terhadap kolonialisme (seperti novel *Max Havelaar*). Politik Etis terdiri dari tiga program: edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Tujuan formalnya adalah “meningkatkan kesejahteraan” bumiputera, namun secara substansial dimaksudkan untuk memperkuat kontrol kolonial.⁵

³ F.S. Gaastra, *Organisasi VOC*, diterjemahkan oleh Syahrity Chairaty Kasim dan Dr. Th. van den End, dalam *Sejarah VOC*, hlm. 28.

⁴ F.S. Gaastra, *Organisasi VOC*, diterjemahkan oleh Syahrity Chairaty Kasim dan Dr. Th. van den End, dalam *Sejarah VOC*, hlm. 42.

⁵ Faizal Arifin, *Pembelajaran Sejarah pada Masa Kolonialisme Belanda*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 9, No. 2, Juli 2020, hlm. 134

Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Indonesia merupakan salah satu fase penting dan dramatis dalam sejarah bangsa. Jepang, yang saat itu sedang gencar memperluas pengaruhnya di Asia, dengan cepat dan terorganisir berhasil menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Serangan militer mereka diawali dengan pendudukan wilayah strategis seperti Tarakan pada 12 Januari 1942 dan mencapai puncaknya ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati, di mana Letnan Jenderal H. Ter Poorten menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura sebagai perwakilan Jepang. Peristiwa ini menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda dan secara resmi dimulainya masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Setelah menguasai wilayah Indonesia, Jepang segera membongkar sistem kolonial lama dan menggantinya dengan pemerintahan militer yang lebih ketat. Pemerintahan sipil Belanda dihapus dan diganti dengan kekuasaan militer Jepang yang dibagi ke dalam tiga wilayah administratif utama. Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang ke-25 yang berkedudukan di Bukittinggi, sementara Jawa dan Madura berada di bawah kendali Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian berada di bawah kendali Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar. Dalam sistem ini, militer menjadi otoritas tertinggi dan seluruh aspek pemerintahan diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.⁶

Untuk mengukuhkan kekuasaannya, Jepang segera memberlakukan hukum militer yang kaku dan memaksakan aturan kolonialnya. Semua bentuk kegiatan dan perkumpulan politik dilarang keras, dan ruang gerak masyarakat pun dibatasi. Dalam upaya menghapus pengaruh Barat, penggunaan bahasa Belanda dan Inggris ditiadakan. Meskipun Jepang berusaha memaksakan bahasanya sendiri,

⁶ Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 13, No. 2 (2019), hlm. 185-205

mereka menyadari bahwa untuk berkomunikasi dan memobilisasi rakyat secara luas, Bahasa Indonesia adalah satu-satunya jalan yang efektif.

Sebagai bagian dari propaganda, Jepang membentuk berbagai organisasi bentukan mereka sendiri. Langkah awal adalah melalui "Gerakan 3A", yang secara masif menyebarkan slogan bahwa Jepang adalah "cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia". Namun, ketika kampanye ini gagal menarik simpati yang tulus, Jepang mengubah taktiknya dan mulai merangkul tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dengan harapan dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggalang dukungan rakyat.⁷

Dalam bidang sosial dan budaya, Jepang memberlakukan kebijakan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan mewajibkan rakyat melakukan *seikerei*, yaitu membungkuk ke arah matahari terbit. Kebijakan ini ditentang oleh kalangan ulama karena bertentangan dengan keyakinan agama. Di bidang pendidikan, meskipun terjadi peningkatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, pendidikan diarahkan untuk menanamkan jiwa militer dan ketaatan kepada kekuasaan Jepang. Ketika Jepang berkuasa, banyak masyarakat umum yang mulai tertarik dengan dunia militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang membentuk pasukan khusus bernama PETA di Jawa dan Gyugun di Sumatra. Pasukan ini berbeda dengan Heiho, yaitu tentara pribumi yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari militer Jepang.⁸

Kekuasaan Jepang mulai melemah ketika mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagai medan perang Pasifik, seperti jatuhnya Pulau Saipan pada Juli 1944. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan menghindari pemberontakan, Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI

⁷ Nino Oktorino, *Konflik Bersejarah: Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 10

⁸ Aiko Kurasawa dan Mitsuko Nanke, *Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia: Bibliografi Beranotasi* (Jakarta: Grasindo bekerja sama dengan The Toyota Foundation, 1990), hlm. 3.

(Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Maret 1945, dan dilanjutkan dengan pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 7 Agustus 1945. Kekalahan total Jepang semakin nyata setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan yang tercipta, para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang sekaligus menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia.⁹

Sementara itu, keberadaan *Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang didirikan pasca tahun 1814, juga menjadi bagian penting dalam kisah kolonialisme. KNIL dibentuk setelah kekalahan Napoleon dan kembalinya kekuasaan Belanda atas Hindia. Tentara ini merupakan alat utama kekuasaan kolonial dan secara administratif berada di bawah Kementerian Koloni, terpisah dari angkatan bersenjata utama Belanda di Eropa. KNIL memiliki peran dominan dalam menekan perlawanan lokal dan menjaga stabilitas kolonial. Mereka terlibat dalam berbagai konflik besar seperti Perang Jawa, Perang Aceh, serta ekspedisi ke Lombok dan Bali. Kampanye-kampanye ini sering disertai kekerasan ekstrem dan pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian menjadi sorotan dalam kritik terhadap kolonialisme Belanda.

Pada tahap awal, KNIL sebagian besar diisi oleh tentara Eropa. Namun, akibat tingginya angka kematian dan kesulitan dalam proses perekrutan, Belanda mulai merekrut prajurit dari kalangan pribumi, terutama dari wilayah Jawa, Ambon, dan Sulawesi, serta dari wilayah Afrika Barat (seperti Ghana yang dikenal sebagai Belanda Hitam), dan juga dari negara-negara seperti Jerman dan Swiss. Komposisi yang beragam ini menuntut perwira Belanda yang hampir seluruhnya berasal dari

⁹ Ayu Nadira Wulandari, Halimah Tusaddiah, Ajeng Priska Sari, Yunita Pebrina, dan Abdi Waruwu, "*Masa Pendudukan Jepang di Indonesia*," INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 2-11

kalangan Eropa untuk menjaga kesatuan dalam tubuh militer yang sangat plural dari segi etnis, agama, dan bahasa. Meski secara formal pada abad ke-20 semua pangkat dan kesatuan dibuka untuk semua etnis, posisi perwira tinggi tetap didominasi oleh orang-orang Eropa.

Setelah berakhirnya Perang di Jawa, total keanggotaan pasukan ini tersebar di tiga pulau, dengan rincian kurang lebih 37.000 orang di Jawa, sekitar 20.000 di Sumatra, dan kira-kira 1.600 di Bali 1850.¹⁰ Pada mulanya KNIL dibentuk hanya untuk Pulau Jawa, namun seiring tujuan Belanda untuk menguasai wilayah lain, pasukannya pun diperbesar. Karena jumlah orang Belanda tidak cukup, sebagian besar tentara direkrut dari kalangan pribumi. Meskipun begitu, ada aturan pangkat yang ketat berdasarkan ras. Prajurit pribumi hanya diizinkan mengisi posisi prajurit bawahan dan tidak diberi kesempatan menjadi perwira. Posisi komando tersebut dikhususkan bagi orang Eropa, yang kekuatannya juga ditambah dengan tentara bayaran. Semua ini dirancang agar KNIL menjadi alat kekuasaan kolonial yang efektif dan terkendali.¹¹

Menjelang invasi Jepang pada 1942, kekuatan KNIL melemah karena pasokan logistik dari Belanda terputus setelah diduduki Jerman. Akibatnya, KNIL menyerah kepada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942 dan sebagian besar tentaranya ditawan. Setelah perang, Belanda membangun kembali KNIL di Australia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, KNIL menjadi instrumen utama Belanda untuk merebut kembali kekuasaan, terbukti dengan dilancarkan dua agresi militer pada 1947 dan 1948. Namun, tekanan internasional dari PBB dan Amerika Serikat akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949.

KNIL akhirnya dibubarkan secara resmi pada 26 Juli 1950. Sebagian anggota pribumi khususnya dari kalangan Jawa dan Ambon diintegrasikan ke

¹⁰ Tazkia Kamila Sofuan, "Rivalitas KNIL dan PETA dalam Sejarah Kemiliteran Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan," *Keraton: Journal of History Education and Culture* 4, no. 2 (Desember 2022): 83.

¹¹ Petrik Matanasi, "Pribumi Jadi Letnan KNIL" (Sleman: TROMPET, 2011), hlm. 11.

dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, sejumlah besar personel dari Maluku memilih tetap setia kepada Belanda dan kemudian dipindahkan ke Belanda. Kebijakan ini memicu ketegangan baru, termasuk munculnya gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan. Di Belanda sendiri, warisan KNIL masih dikenang melalui institusi seperti Museum Bronbeek dan simbol-simbol militer seperti Regiment Van Heutsz. Meskipun demikian, warisan KNIL tetap menjadi aspek kontroversial dalam sejarah hubungan Indonesia–Belanda, terutama karena keterlibatannya dalam praktik represi dan kekerasan kolonial yang sistematis terhadap rakyat Indonesia.¹²

Secara temporal, kajian ini dibatasi secara ketat pada periode 1942 hingga 1945, yang dimulai dari pendudukan Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) dan penyerahan kekuasaan Belanda, hingga proklamasi kemerdekaan. Batasan waktu ini sangat krusial untuk menganalisis puncak tindakan represif dan penahanan yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap personel *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* (KNIL), terutama setelah KNIL secara resmi dibubarkan oleh Jepang. Secara spasial, fokus kajian utama adalah di wilayah Indonesia (eks-Hindia Belanda), yang menjadi lokasi penangkapan, pemenjaraan, dan kerja paksa (terutama di kamp-kamp interniran) terhadap mantan tentara KNIL, baik yang berkebangsaan Belanda maupun pribumi. Dampak awal yang menjadi fokus adalah penghancuran total struktur militer KNIL, penahanan massal para perwira dan serdadu, serta penggunaan mereka sebagai tenaga kerja paksa, yang secara langsung mengakibatkan trauma fisik dan psikologis serta kekosongan kekuasaan militer yang memicu perkembangan organisasi perlawanan lokal di masa selanjutnya.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik yang mendalam karena mengisi kekosongan narasi mengenai nasib mantan tentara kolonial di bawah kekuasaan baru, terutama dalam konteks perlakuan militer Jepang yang terkenal keras. Secara akademik, kajian ini membantu menganalisis perubahan loyalitas dan

¹² <https://www.tracesofwar.nl/articles/7138/Nederlands-Koninklijk-Nederlandsch-Indisch-Leger-KNIL.htm> diakses pada 2 juni 2025

identitas di kalangan personel KNIL pribumi sebuah aspek yang sering terabaikan dan mengungkap secara terperinci mekanisme sistematis represi, kekerasan, dan dehumanisasi yang diterapkan Jepang. Dari segi efektivitas dan relevansi praktis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih kaya mengenai akar konflik dan trauma kolektif selama masa Perang Dunia II di Asia Tenggara. Terakhir, secara personal, mengangkat isu perlakuan represif terhadap tentara KNIL oleh Jepang penting untuk memberikan pengakuan atas penderitaan dan kisah-kisah individu yang bertahan hidup di kamp interniran dan kerja paksa, memberikan dimensi kemanusiaan yang kritis terhadap sejarah militer yang penuh konflik.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan kondisi Tentara KNIL setelah Hindia Belanda diambil alih oleh Jepang pada tahun 1942. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul ***“Tindakan Represif Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942–1945)”***. Harapan penulis dengan adanya judul ini dapat bermanfaat untuk mengetahui sejarah pada masa pendudukan Jepang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan didalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika KNIL hingga Kejatuhan Hindia Belanda?
2. Bagaimana Tindakan Represif Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan Tindakan Represif Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942–1945). Tujuan khusus dari penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dinamika KNIL hingga Kejatuhan Hindia Belanda.
2. Untuk menganalisis Tindakan Represif Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini diawali dengan tinjauan sistematis terhadap studi-studi yang relevan sebelumnya. Langkah ini penting untuk membangun konteks, mendapatkan dasar perbandingan, dan dapat menjadikan riset-riset tersebut sebagai referensi utama. Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa kajian terdahulu yang topiknya bersinggungan erat, yang akan menjadi acuan dalam pembahasan ini.

Adapun penelitian terdahulu yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut;

1. Skripsi Muhammad Facrulrozi, *“Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) di Sumatera Barat 1945-1950”* Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Facrulrozi berjudul *“Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) di Sumatera Barat 1945–1950”* merupakan salah satu karya ilmiah yang menyoroti keberadaan dan peran tentara KNIL pasca-Perang Dunia II, khususnya dalam konteks konflik militer dan politik yang terjadi setelah Belanda kembali berupaya menguasai Indonesia pasca-kemerdekaan. Dalam kajiannya, Facrulrozi menitikberatkan pada peran militer KNIL di daerah Sumatera Barat dalam kurun waktu 1945 hingga 1950, yakni masa-masa awal Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah dinamika militer KNIL sebagai alat kolonial Belanda dalam menghadapi gerakan kemerdekaan dan bagaimana interaksinya dengan masyarakat lokal. *Sementara topik yang diambil oleh penulis* lebih menitikberatkan pada masa transisi kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan bagaimana hal tersebut berdampak langsung terhadap keberadaan dan kondisi tentara KNIL, baik secara institusional maupun individual. Masa ini merupakan periode krusial karena tentara KNIL mengalami kekalahan telak dari tentara Jepang, diikuti dengan pembubaran satuan, penangkapan,

dan penahanan terhadap banyak serdadu KNIL, termasuk yang berasal dari kalangan pribumi.

2. Jurnal Lucia Arter Lintang Gritanti dengan judul, "*Sejarah Kehidupan Perang Korps Militer Hindia Belanda pada Awal Abad ke-19*" Penelitian yang ditulis oleh Lucia Arter Lintang Gritanti dengan judul "*Sejarah Kehidupan Perang Korps Militer Hindia Belanda pada Awal Abad ke-19*" membahas fase awal pembentukan dan peran korps militer kolonial Belanda yang kelak dikenal sebagai *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* (KNIL). Fokus kajiannya adalah kondisi sosial, ekonomi, dan militer tentara kolonial Belanda dalam berbagai peperangan internal dan eksternal pada awal abad ke-19, termasuk proses rekrutmen, struktur organisasi, dan bagaimana militer digunakan sebagai alat penaklukan serta pengendalian wilayah jajahan oleh pemerintah kolonial. Sementara itu, skripsi ini membahas Tindakan Represif Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942–1945), yakni saat eksistensi militer kolonial tersebut memasuki fase kemunduran drastis. Pada periode ini, KNIL mengalami pembubaran, sebagian besar anggotanya ditawan oleh Jepang, dan institusi militernya tidak lagi berfungsi sebagaimana sebelumnya. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada kondisi prajurit, pengalaman mereka sebagai tahanan perang, serta perubahan status mereka dalam situasi kekuasaan yang bergeser dari Belanda ke Jepang.
3. Jurnal yang ditulis oleh Taqwa Ridlo Utama & Putri Agus Wijayati dalam artikelnya yang berjudul "*Reformasi Pelatihan KNIL Tahun 1938–1942: Persiapan Hindia Belanda Menghadapi Ekspansi Jepang*" Jurnal yang ditulis oleh Taqwa Ridlo Utama & Putri Agus Wijayati dalam artikelnya yang berjudul "*Reformasi Pelatihan KNIL Tahun 1938–1942: Persiapan Hindia Belanda Menghadapi Ekspansi Jepang*" membahas tentang kebijakan reformasi militer yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda menjelang kedatangan Jepang ke wilayah Asia Tenggara. Fokus penelitian ini berada pada periode 1938–1942, yaitu masa sebelum pendudukan Jepang, dengan menitikberatkan pada upaya-upaya perbaikan

struktur pelatihan, taktik militer, dan perekrutan personel KNIL sebagai antisipasi ancaman militer dari Jepang. Artikel ini menjelaskan bagaimana KNIL, sebagai pasukan kolonial, berusaha dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan perang besar dengan Jepang. Sementara itu, topik penelitian skripsi ini, *“Tindakan Represif Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942–1945)”*, berfokus pada masa setelah Jepang benar-benar menguasai wilayah Hindia Belanda. Penelitian ini mengkaji bagaimana kondisi internal KNIL berubah drastis setelah kekalahan Belanda oleh Jepang, termasuk pembubaran satuan, penahanan terhadap para serdadu (baik Eropa maupun pribumi), dan bagaimana mereka diperlakukan oleh otoritas militer Jepang.

E. Metode Penelitian

Dalam langkah-langkah penelitian penulis menggunakan metode sejarah yang menjelaskan bahwa sejarah adalah kerangka yang sistematis yang berfungsi sebagai prinsip dan desain untuk mengoptimalkan pencarian sumber sejarah, memberikan kritik, serta menyusun penilaian dan sintesis. Proses ini bertujuan menghasilkan generalisasi dalam bentuk tulisan guna mencapai hasil yang berkualitas. Dalam penerapannya, metode sejarah ini mencakup 4 tahapan utama, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.¹³

1. Heuristik

Heuristik adalah tahap awal penelitian sejarah yang berfokus pada penemuan dan pengumpulan sumber. Istilah yang berakar dari bahasa Yunani "heuriskein" ini mencakup proses pencarian sumber-sumber utama yang terkait dengan topik, yang kemudian diperkaya dengan sumber-sumber tambahan untuk mendukung kedalaman riset.¹⁴

Secara umum, sumber-sumber tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, sumber primer, yaitu sumber yang dibuat pada periode

¹³ Wulan Juliani Sukma, *“Metode Penelitian Sejarah”*, Seri Publikasi Pembelajaran, Vol 1 No 2, 2021, Hal. 3

¹⁴ Ajid Thohir, Ahmad Sahidin. *“Filsafat Sejarah”*., hlm. 145

yang sama (sezaman) dengan peristiwa yang dikaji. Kedua, sumber sekunder, yakni sumber yang tidak sezaman namun memiliki peran krusial dalam mendukung dan memverifikasi validitas sumber primer.¹⁵ Mengacu pada klasifikasi tersebut, penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber primer yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Sumber tertulis:

- 1) Kesaksian tentang Letnan Davijt dan peristiwa Pootessibau, 14 Desember 1945.
- 2) Surat Perintah Panglima Angkatan Darat KNIL Letnan Jenderal H. ter Poorten, 6 Maret 1942, mengenai perintah pertahanan Bandung.
- 3) Laporan Kebutuhan Persenjataan dan Organisasi KNIL di Jawa, tahun 1942.
- 4) Telegram Rahasia Perdana Menteri Belanda P.S. Gerbrandy kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 14 Desember 1941.
- 5) Naskah Kebijakan Pertahanan Hindia Belanda ("Het Defensiebeleid"), sekitar 1941.
- 6) Arsip dari Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1942-1943, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 251, dokumen 0105.
- 7) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) periode 1942-1944, dengan referensi arsip: koleksi 508, inventaris no. 1038, dan dokumen 0006.
- 8) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1942-1944, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 1046, dokumen 0003.
- 9) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1942-1944, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 1087, dokumen 0004.
- 10) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1942, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 662, dokumen 0001.

¹⁵ Sulasman. "*Metodologi Penelitian Sejarah*", hlm. 93-96.

- 11) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1944-1945, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 838, dokumen 0001.
- 12) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1942-1944, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 844, dokumen 0002.
- 13) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1944, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 849, dokumen 0002.
- 14) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1942, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 859, dokumen 0001.
- 15) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dari tahun 1942-1946, dengan kode koleksi 508, no. inventaris 878, dokumen 0001.

b) Sumber benda berupa persenjataan dan perlengkapan perang yang dimiliki oleh prajurit KNIL.

Dalam pengumpulan sumber sekunder penulis mengumpulkan berupa, buku, skripsi, artikel, dan sumber-sumber dari internet yang memiliki kesamaan dengan pembahasan mengenai Tindakan Represif Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942–1945).

- 1) Buku yang berjudul “Ensiklopedi Penduduka Jepang di Indonesia” yang ditulis oleh Nino Oktorino, penerbit buku PT Elex Media Komputindo 2013.
- 2) Buku yang berjudul “Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945” yang ditulis oleh R.N Bayu Aji, dkk, penerbit buku UNESA University Press, 2020.
- 3) Buku yang berjudul “Runtuhnya Hindia Belanda” yang ditulis oleh Nino Oktorino, penerbit buku PT Elex Media Komputindo 2013.
- 4) Buku yang berjudul “Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942-1998” yang ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, penerbit buku Balai Pustaka, 2008.

- 5) Buku yang berjudul “Pribumi Jadi Letnan KNIL” yang ditulis Petrik Matanasi, penerbit buku TROMPET, 2019.
- 6) Buku yang berjudul “*Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia: Bibliografi Beranotasi*” yang ditulis Aiko Kurasawa, penerbit buku Grasindo bekerja sama dengan The Toyota Foundation, 1990.
- 7) Jurnal yang berjudul “*Masa Pendudukan Jepang di Indonesia*” yang ditulis Ayu Nadira Wulandari, Halimah Tusaddiah, dkk, penerbit INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, 2024.
- 8) Jurnal yang berjudul “Rivalitas KNIL dan PETA dalam Sejarah Kemiliteran Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan” yang ditulis Tazkia Kamila Sofuan, *Keraton: Journal of History Education and Culture* 4, no. 2, 2022.

2. Kritik Sumber

Setelah tahap heuristik di mana sumber-sumber sejarah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah kritik. Proses ini merupakan pengujian mendalam terhadap sumber untuk menentukan kelayakannya sebagai bahan rekonstruksi sejarah. Hanya data yang telah melewati saringan kritik, baik kritik intern (menilai isi) maupun kritik ekstern (menilai keaslian fisik), yang dapat dianggap sebagai fakta sejarah.¹⁶ Kritik ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kritik ekstern yang berfokus pada aspek fisik sumber, serta kritik intern yang mengkaji isi dan konteksnya. Dengan demikian, hasil dari proses kritik tidak hanya memperkokoh keabsahan sumber yang digunakan, tetapi juga memperkuat kualitas referensi sebagai pijakan fundamental dalam penulisan sejarah yang kredibel.¹⁷

Kritik intern adalah proses kritik yang bertujuan untuk memastikan tingkat kredibilitas sumber yang diambil oleh penulis sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk memvalidasi bahwasanya sumber yang diambil oleh penulis merupakan

¹⁶ Ajid Thohir, Ahmad Sahidin. “*Filsafat Sejarah*”, hlm. 146

¹⁷ Sulasman, “*Metodologi Penelitian Sejarah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Hal. 104

sumber yang autentik atau tidak.¹⁸ Dalam metodologi sejarah, sumber lisan adalah pelengkap penting bagi sumber dokumen, namun validitasnya menuntut pengujian yang lebih kompleks. Untuk tradisi lisan atau kesaksian, diperlukan verifikasi melalui saksi berantai untuk memastikan konsistensi laporan dari saksi pertama hingga selanjutnya. Proses ini dapat diperkuat dengan melakukan konfrontasi atau diskusi kelompok antar saksi.¹⁹

Adapun hasil kritik ekstern yang dihasilkan oleh penulis adalah sebagai berikut;

1) *Arsip dari Nederlands Indisch Militair Historisch Archief* yang ditemukan oleh penulis yang dikeluarkan tahun 1942, kode 58, no. 793, dokumen 30. Arsip tersebut diakses penulis dalam bentuk digital melalui laman Archieven.nl pada tanggal 29 Juni 2025. Kondisi dokumen telah terjaga melalui proses digitalisasi, dengan kualitas visual yang cukup baik untuk dibaca dan dianalisis.

2) Dokumen arsip yang digunakan penulis adalah surat perintah resmi dari Panglima Angkatan Darat Belanda di Hindia Belanda, Letnan Jenderal H. ter Poorten, tertanggal 6 Maret 1942. Arsip ini berasal dari koleksi Nationaal Archief Den Haag, Belanda, dengan kode NIMH 508 dan inventaris nomor 84. Dokumen tersebut diakses penulis dalam bentuk digital melalui laman Archieven.nl pada tanggal 1 Juli 2025. Melalui proses digitalisasi, kondisi surat perintah ini masih terjaga dan dapat dibaca dengan jelas

3) Dokumen arsip yang digunakan penulis berasal dari koleksi Nationaal Archief Den Haag, Belanda, dalam kelompok arsip Nederlands-Indisch Militair Historisch Archief (NIMH) dengan kode 508- dan nomor inventaris 4624501. Dokumen ini diakses secara daring melalui laman resmi Archieven.nl pada tanggal 1 Juli 2025. Arsip tersebut telah mengalami proses digitalisasi, sehingga kondisinya masih terjaga dan dapat ditelusuri secara online. Berdasarkan

¹⁸ Drs. Lilik Zulaicha, M.Hum, "*Metodologi Sejarah*", (Buku Perkuliahan Program S1 Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya) hal.17

¹⁹ Ajid Thohir, Ahmad Sahidin. "Filsafat Sejarah"., hlm. 147

informasi katalog dan kode arsip yang tercantum, dokumen ini merupakan bagian dari laporan atau komunikasi militer yang berkaitan dengan aktivitas tentara KNIL pada tahun 1942, yakni masa awal pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Sumber ini relevan dengan kajian penelitian penulis.

4) Dokumen arsip yang digunakan penulis adalah laporan militer resmi dari koleksi Nationaal Archief Den Haag, Belanda, yang tergolong dalam kelompok arsip Nederlands-Indisch Militair Historisch Archief (NIMH) dengan kode 508 dan nomor inventaris 94. Dokumen ini diperoleh penulis dalam bentuk digital melalui laman resmi Archieven.nl pada tanggal 7 Juli 2025. Meskipun berasal dari tahun 1942, kondisi fisik dokumen ini masih sangat terjaga melalui proses digitalisasi, di mana warna, ketikan, serta struktur dokumen dapat terbaca secara jelas dan utuh. Dokumen ini juga relevan dengan judul penelitian penulis yang mengangkat tema "Perlakuan Kekuasaan Jepang Terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942–1945)".

5) Dokumen arsip yang digunakan penulis adalah salinan telegram rahasia tertanggal 14 Desember 1941, dikirim oleh Perdana Menteri Belanda P.S. Gerbrandy kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Arsip ini berasal dari koleksi Nationaal Archief Den Haag, dalam kelompok Nederlands-Indisch Militair Historisch Archief (NIMH), dengan kode 508 dan nomor inventaris 99. Dokumen ini diakses secara daring melalui laman Archieven.nl dan telah terdigitalisasi dengan baik. Format ketikan masih jelas terbaca dan stempel otentik dari bagian militer menunjukkan keaslian administrasinya. Sumber ini sangat layak digunakan dalam kajian sejarah militer dan kolonial karena merupakan arsip primer bersifat rahasia yang dibuat tepat pada saat menjelang pendudukan Jepang.

6) Dokumen arsip yang digunakan penulis adalah naskah ketikan resmi berjudul "Het Defensiebeleid" (Kebijakan Pertahanan) yang berasal dari koleksi Nederlands-Indisch Militair Historisch Archief (NIMH) di Nationaal Archief Den Haag, Belanda, dengan kode 508 dan nomor inventaris 95. Dokumen ini diakses penulis dalam bentuk digital melalui portal arsip resmi dan telah terdigitalisasi dengan baik, meskipun tampak adanya kerusakan ringan pada sisi bawah kertas. Teks tetap terbaca secara utuh dan dapat dianalisis secara kritis. Sumber ini sangat relevan dengan judul penelitian penulis mengenai nasib tentara KNIL selama

pendudukan Jepang (1942–1945), karena memberikan latar belakang struktural dan kebijakan atas keruntuhan militer Belanda.

Adapun hasil kritik intern dari sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut;

1) *Arsip dari Nederlands Indisch Militair Historisch Archief* yang ditemukan oleh penulis yang dikeluarkan tahun 1942, kode 58, no. 793, dokumen 30. Dokumen ini berisi kesaksian mengenai peristiwa terbunuhnya Letnan Davijt beserta rombongannya di daerah Pootessibau (sekarang Putussibau) oleh kelompok lokal di bawah tekanan Jepang pada tahun 1942. Sumber ini dinilai layak digunakan karena berasal dari catatan resmi militer Belanda pasca-pendudukan Jepang, dan relevan dalam memberikan gambaran tentang sisa-sisa perlawanan tentara KNIL di pedalaman Kalimantan Barat.

2) Surat perintah resmi dari Panglima Angkatan Darat Belanda di Hindia Belanda, Letnan Jenderal H. ter Poorten, tertanggal 6 Maret 1942. Dokumen ini memuat instruksi langsung kepada pasukan Belanda di Bandung agar menghindari pertempuran di dalam kota, menjaga ketertiban umum, mencegah penjarahan, dan menyerahkan kota kepada Jepang secara tertib apabila musuh berhasil menembus garis pertahanan. Sumber ini dinilai layak digunakan dalam kajian ini karena merepresentasikan pandangan dan kebijakan resmi militer Belanda pada masa menjelang jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Relevansinya cukup kuat dalam menggambarkan situasi genting, keputusan strategis, serta sikap formal militer kolonial dalam menghadapi kekalahan.

3) *Nederlands-Indisch Militair Historisch Archief* (NIMH) dengan kode 508-149 dan nomor inventaris 4624501. Dokumen ini merupakan bagian dari korespondensi atau laporan militer terkait aktivitas *Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* (KNIL) pada masa awal pendudukan Jepang tahun 1942. Kondisi arsip telah terdigitalisasi dengan baik dan dapat diakses melalui permintaan lanjutan. Sumber ini layak digunakan dalam kajian sejarah militer karena berasal dari institusi resmi militer kolonial Belanda dan ditulis pada masa peristiwa atau segera setelahnya. Relevansi dokumen ini terletak pada kemampuannya

memberikan perspektif dari dalam struktur militer KNIL tentang respons mereka terhadap serangan Jepang, serta dinamika internal menjelang runtuhnya kekuasaan Belanda di Hindia Timur.

4) Arsip Nederlands-Indisch Militair Historisch Archief (NIMH) dengan kode 508 dan nomor inventaris 94. Isi dokumen ini menjelaskan tentang struktur organisasi KNIL di Jawa, kendala dalam pelatihan milisi lokal, serta kebutuhan mendesak akan senjata dan perlengkapan tempur seperti senapan ringan, peluru, kendaraan tempur, dan artileri anti-udara. Melalui daftar kebutuhan tersebut, terlihat jelas bahwa pasukan KNIL dalam posisi yang sangat terbatas baik secara logistik maupun kesiapan tempur. Sumber ini layak digunakan dalam penelitian karena memberikan gambaran langsung mengenai kelemahan militer kolonial Belanda dari sudut pandang internal. Dokumen ini relevan dalam memperkuat pemahaman bahwa salah satu faktor utama kekalahan KNIL dalam menghadapi serangan Jepang adalah lemahnya kesiapan teknis dan ketergantungan pada bantuan luar yang tidak kunjung datang.

5) Telegram rahasia tertanggal 14 Desember 1941, dikirim oleh Perdana Menteri Belanda P.S. Gerbrandy kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Isi telegram mencerminkan respons strategis pemerintah Belanda di pengasingan menjelang perluasan invasi Jepang, khususnya terkait rencana penghancuran instalasi minyak di Borneo guna mencegah penggunaannya oleh musuh. Dokumen ini memberikan gambaran nyata tentang hubungan diplomatik dan koordinasi militer-politik antara pemerintah Belanda, Inggris, dan Hindia Belanda pada masa genting. Dokumen ini juga menunjukkan dimensi kebijakan pusat yang memengaruhi keputusan militer dan strategi pertahanan di wilayah koloni. Selain itu, isi dokumen memperjelas adanya antisipasi kehancuran sistemik kolonial Belanda, bahkan sebelum invasi berlangsung secara penuh.

6) “Het Defensiebeleid” (Kebijakan Pertahanan) yang berasal dari koleksi Nederlands-Indisch Militair Historisch Archief (NIMH) di Nationaal Archief Den Haag, Belanda, dengan kode 508 dan nomor inventaris 95. Isi dokumen merupakan tinjauan administratif terhadap lemahnya fondasi kebijakan

pertahanan Hindia Belanda menjelang Perang Dunia II. Ditekankan bahwa selama bertahun-tahun, kebijakan pertahanan bersifat ambigu, tidak konsisten, dan terlalu bergantung pada diskusi tanpa keputusan nyata. Selain itu, dokumen ini menegaskan bahwa baik dari sisi sumber daya ekonomi, dukungan politik, maupun letak geografis, Hindia Belanda berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan diri secara mandiri terhadap serangan besar seperti dari Jepang. Dokumen ini memperlihatkan bahwa kelemahan pertahanan bukan hanya bersifat taktis di medan perang, tetapi berakar dari kebijakan yang lemah, minim visi, dan birokratis sejak jauh hari sebelum invasi terjadi.

3. Interpretasi

Setelah melalui proses kritik terhadap sumber-sumber sejarah, sejarawan akan memasuki tahap interpretasi. Tahap ini memiliki signifikansi yang tinggi karena merupakan langkah terakhir sebelum proses penulisan sejarah dilakukan. Pada tahap interpretasi, sumber-sumber sejarah yang melewati verifikasi dan dinyatakan valid melalui kritik akan ditafsirkan secara mendalam untuk memahaminya. Penafsiran ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan narasi sejarah yang akurat dan ilmiah.²⁰ Dalam konteks ini, seorang ahli sejarah berkewajiban untuk merekonstruksi dan menafsirkan suatu fenomena historis secara berlandaskan pada bukti-bukti sumber yang berhasil ditemukan.²¹

Proses penafsiran sejarah bertujuan untuk mensintesis serangkaian fakta yang diverifikasi dari sumber-sumber historis dengan apparatus teoretis yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah narasi sejarah yang koheren dan menyeluruh.²² Hal ini ditunjukkan melalui kapasitasnya dalam menguraikan kompleksitas fakta, menegaskan urgensi topikalnya, dan menghubungkannya dengan problematika kekinian.²³

²⁰ Wulan Juliani Sukma, "*Metode Penelitian Sejarah*", Seri Publikasi Pembelajaran, Vol 1 No 2, 2021, Hal.

²¹ Aditia Muara Padiatara, 2020. *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. hlm. 35.

²² Sulasman. "*Metodologi Penelitian Sejarah*"., hlm. 107.

²³ Sulasman. "*Metodologi Penelitian Sejarah*"., hlm. 111.

Dalam interpretasi ini, penulis menggunakan kerangka teori kekerasan dari Johan Galtung untuk menganalisis judul "Tindakan Represif Kekuasaan Jepang terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942-1945)". Pendekatan Galtung, yang membedakan antara Kekerasan personal (langsung) dan kekerasan struktural (tidak langsung), menawarkan lensa yang kuat untuk memahami penderitaan para tawanan perang tidak hanya sebagai akibat dari tindakan brutal individu, tetapi juga sebagai produk dari sebuah sistem yang menindas secara inheren. Analisis ini akan menguraikan bagaimana kedua bentuk kekerasan tersebut termanifestasi dan saling memperkuat selama periode pendudukan Jepang

Judul "Tindakan Represif Kekuasaan Jepang terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942-1945)" dapat dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka teori dari Johan Galtung. Galtung mendefinisikan kekerasan secara luas, bukan hanya sebagai tindakan fisik, tetapi sebagai kondisi di mana manusia dihalangi untuk mencapai potensi realisasi somatik (fisik) dan mental mereka.²⁴ Pendekatannya yang paling fundamental membedakan antara dua jenis kekerasan: kekerasan personal (langsung) dan kekerasan struktural (tidak langsung). Dengan lensa ini, perlakuan terhadap tentara KNIL dapat dipahami sebagai sebuah sistem opresi yang komprehensif.

Perlakuan yang diterima tentara KNIL adalah manifestasi nyata dari kekerasan personal. Ini adalah jenis kekerasan di mana ada aktor (subjek) yang jelas melakukan tindakan, seperti tentara Jepang yang menyiksa tawanan KNIL. Bentuknya mencakup kekerasan fisik seperti pemukulan, kerja paksa, dan eksekusi yang merusak tubuh dan kekerasan psikologis, berupa ancaman, penghinaan, dan indoktrinasi yang bertujuan menurunkan potensi mental para tawanan.²⁵ Kekerasan ini bersifat "manifest" atau terlihat, dinamis, dan mudah dikenali karena memiliki struktur drama yang jelas: pelaku, tindakan, dan korban.

²⁴ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969), hal. 168.

²⁵ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969), hal. 169.

Di luar tindakan individu, kekuasaan Jepang juga menerapkan kekerasan struktural. Menurut Galtung, ini adalah kekerasan yang "tertanam di dalam struktur" itu sendiri dan muncul sebagai ketidaksetaraan kekuasaan serta kesempatan hidup, tanpa ada pelaku tunggal yang bisa ditunjuk. Kamp-kamp tawanan adalah contoh sempurna dari sebuah struktur yang melakukan kekerasan. Sistem di dalamnya dengan distribusi makanan, air, dan layanan medis yang sangat tidak merata secara inheren menciptakan kondisi mematikan. Seorang tawanan yang meninggal karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah adalah korban kekerasan struktural, karena potensinya untuk hidup dihalangi oleh sistem.²⁶ Galtung menyebut kondisi kekerasan struktural ini sebagai ketidakadilan sosial (social injustice).

Kedua bentuk kekerasan ini saling memperkuat. Kekerasan struktural yang terjadi di kamp-kamp tawanan ditegakkan melalui ancaman atau praktik kekerasan personal secara terus-menerus. Galtung menjelaskan bahwa ketika sebuah struktur yang menindas terancam, mereka yang diuntungkan darinya akan menggunakan kekerasan personal untuk mempertahankan status quo. Aturan kamp yang tidak manusiawi (kekerasan struktural) hanya dapat dipertahankan karena adanya ancaman pemukulan atau eksekusi bagi yang melanggar (kekerasan personal). Dengan demikian, kekerasan personal menjadi alat untuk melanggengkan kekerasan struktural.

Kesimpulannya, analisis Galtung menunjukkan bahwa perlakuan terhadap tentara KNIL bukanlah sekadar rangkaian tindakan brutal, melainkan sebuah sistem kekerasan yang total. Pendudukan Jepang menciptakan suatu kondisi yang menghancurkan

kedamaian negatif (ketiadaan kekerasan personal) sekaligus memberangus kedamaian positif (ketiadaan kekerasan struktural atau adanya keadilan sosial). Judul tersebut, dengan demikian, merujuk pada sebuah studi kasus tentang kondisi

²⁶ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969), hal. 171.

kekerasan yang menyeluruh, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam system.²⁷

4. Historiografi

Tahap akhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Secara etimologis, historiografi berasal dari kata “history” yang berarti sejarah dan “graf” yang berarti tulisan. Jadi, historiografi berarti penulisan sejarah yang disusun secara berurutan sesuai kronologi waktu secara berkesinambungan. Penelitian ini diatur berdasarkan sistematika penulisan berikut.

Sebagai puncak dari penelitian sejarah, historiografi adalah proses mengubah interpretasi fakta menjadi sebuah narasi atau laporan tertulis. Bentuk penyajiannya bervariasi tergantung tujuan sejarawan. Ada penulisan naratif yang berfokus menceritakan "apa" yang terjadi secara runtut, dan ada penulisan analitis yang mendalami "mengapa" suatu peristiwa terjadi dengan mengkaji hubungan sebab-akibat.²⁸

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka dan langkah-langkah penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi tentang penelitian dari judul “*Tindakan Represif Kekuasaan Jepang terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942-1945)*”.

Bab II, Latar Belakang Tentara KNIL dan Kejatuhan Hindia Belanda.

Bab III, Pembahasan mengenai *Tindakan Represif Kekuasaan Jepang terhadap Tentara KNIL di Indonesia (1942-1945)*

Bab IV, Kesimpulan.

²⁷ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969), hal. 183.

²⁸ Ajid Thohir, Ahmad Sahidin. “*Filsafat Sejarah*”, hlm. 149